

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Charles Simabura. *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dinal Fedrian dkk., *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia: Pembaruan Substansi Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- H.L.A. Hart. *Konsep Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Inu Kencana Syafii. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: SinarGrafika, 2012.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- M, Faried Ali. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Pataniari Siahaan. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress, 2012.
- Susan Rose-Ackerman. *Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. Website:

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/07/13/265008/icw-sebut-uu-md3-lindungi-anggota-dpr-bermasalah-hukum>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ee058408a23/akhirnya--dpd-gugat-u-u-md3>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543b7498de722/akuntabilitas-dan-transparansi-wewenang-dan-tugas-dpr-dalam-uu-md3-broleh--frans-h-winarta>

<http://www.beritasatu.com/nasional/208881-uu-md3-dinilai-mereduksi-akuntabilitas-dan-transparansi-dpr.html>

<http://www.skanaa.com/en/news/detail/jimly-perlunya-transparansi-perencanaan-apbn>

<https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>

D. Risalah, Jurnal, Kamus dan Lain-lain:

Daftar Inventarisasi Masalah Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2014

Risalah Sidang Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Persidangan ke IV

